

ABSTRAK

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI DESA SERANGMEKAR KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG

Indonesia merupakan negara agraris, dimana penduduknya sebagian besar bermatapencaharian dengan pertanian. Oleh karena itu tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan UUPA menyatakan bahwa tanah diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, oleh karena itu penguasaan tanah yang melampaui batas oleh segelintir orang tidak diperkenankan. Larangan kepemilikan tanah secara *absentee* (guntai) adalah larangan kepemilikan tanah pertanian yang letaknya di luar wilayah kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Dasar hukumnya adalah Pasal 10 UUPA dan selain itu Pemerintah menerbitkan PP No. 224 Tahun 1961, PP No. 41 Tahun 1964 dan PP No. 4 Tahun 1977 sebagai peraturan pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Bagaimana efektivitas pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung; 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung; 3) Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam efektivitas pelaksanaan larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan serta menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat sehingga ditemukan gambaran yang jelas mengenai efektivitas larangan kepemilikan tanah secara *absentee* tersebut di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Metode pendekatannya yaitu *yuridis sosiologis/empiris*. Sumber data berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek tempat penelitian dan narasumber serta data sekunder yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee* belum efektif. Faktor-faktor penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee/guntai* adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana dan prasarana dan faktor ekonomi. Untuk itu Kantor Pertanahan telah melakukan upaya untuk mengatasi terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* di Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung yaitu dengan melakukan penertiban administrasi dan penertiban hukum. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah *absentee/guntai* baru perlu diadakan koordinasi antara Kantor Pertanahan dengan instansi yang terkait yaitu Camat, Kepala Desa dan PPAT/Notaris.